

**UPAYA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM  
PEMBERDAYAAN EKS PEKERJA SEKS KOMERSIAL (Study di Teluk  
Betung Utara Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI  
dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

**Oleh**

**JOTY PRATAMA  
NPM. 1541020012**

**Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2019M**

**UPAYA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM  
PEMBERDAYAAN EKS PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI TELUK  
BETUNG UTARA BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana SI dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi**

**Oleh**

**JOTY PRATAMA  
NPM. 1541020012**

**Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. M.A. Achlami HS, MA.  
Pembimbing II : M. Apun Syaripudin, M. Si.**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2019M**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN EKS PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI TELUK BETUNG UTARA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
Joti Pratama**

Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam pemberdayaan Eks Pekerja Seks Komersial adalah salah satu program pemerintah untuk mengatasi fenomena PSK yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Tujuan program ini adalah terbinanya para penyandang masalah tuna susila menjadi berkemampuan dan berkemauan untuk mengembalikan harga diri, kepercayaan diri dan tanggung jawab sosial dalam melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar melalui pembinaan fisik, mental, sosial dan pelatihan ketrampilan.

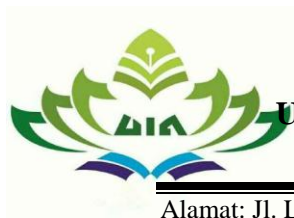
Rumusan masalah Penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Dalam Pemberdayaan Eks Pekerja Seks Komersial Di Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran data lengkap yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menentukan sampel, menggunakan teknik *non random sampling*. Adapun kriteria yang penulis berikan maka sampel berjumlah 11 orang. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan eks pekerja seks komersial melalui tiga tahapan yaitu : (1) Tahap Pendekatan Awal meliputi (Orientasi dan konsultasi, Identifikasi, Motivasi, Seleksi) (2) Tahap Penerimaan meliputi (Registrasi, Pengungkapan dan penelaahan masalah, Penempatan dan pelayanan rehabilitasi) (3) Tahap Bimbingan meliputi (Bimbingan Fisik, Bimbingan Mental/Psikologis, Bimbingan Sosial/ Kemasyarakatan, Bimbingan Keterampilan).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya yang di lakukan LKS Kreasi dalam pemberdayaan eks psk sudah cukup efektif tetapi perlu ada perbaikan untuk program selanjutnya. LKS hendaknya lebih meningkatkan profesionalitas untuk kegiatan rehabilitasi, khususnya kegiatan keterampilan, lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal perencanaan program, penyediaan fasilitas, penyediaan trainer, pendanaan, maupun dalam hal pengawasan program. Juga perlu adanya kerja sama dengan ketua RT/ RW/ Desa/ Kelurahan/ Dinsos pengirim dan masyarakat setempat dalam hal pemantauan kelayan yang telah dibina.

**Kata Kunci :** Upaya Pemberdayaan Eks Pekerja Seks Komersial.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **“UPAYA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DALAM PEMBERDAYAAN EKS PEKERJA SEKS  
KOMERSIAL DI TELUK BETUNG UTARA BANDAR  
LAMPUNG”**

Nama : Joti Pratama

NPM : 1541020012

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 21 Oktober 2019

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. M.A. Achlami HS, MA.**  
**NIP. 195501141987031001**

**M. Apun Syaipudin, M.Si.**  
**NIP. 197209291998031003**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

**Dr. H. Mawardi J, M.Si.**  
**NIP.197112152007012002**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Guna menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang beberapa istilah yang terkandung dalam proposal penulis yaitu , “Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dalam Pemberdayaan Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Teluk Betung Utara Bandar Lampung“. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Upaya**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian Upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya. Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.<sup>1</sup>

Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijelaskan lagi bahwa Pengertian upaya dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang melaksanakan

---

<sup>1</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal.1131

kegiatannya dalam rangka untuk mewujudkan tujuan ataupun maksud dari apa yang dikerjakan.<sup>2</sup>

Seperti yang dijelaskan di atas tentunan upaya tersebut harus dilaksanakan secara serius dan mempunyai kemauan yang tinggi untuk mewujudkannya. Upaya tersebut juga harus dilaksanakan secara berkesinambungan hingga suatu persoalan dapat terpecahkan atau dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan berbagai kendala yang menghambat suatu tujuan dapat diatasi.

## **2. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)**

Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang disebut LKS adalah Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).<sup>3</sup> Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama, berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Maknanya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, namun target utamanya adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 terklasifikasi dalam 7

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 1132

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 713

(tujuh) kelompok, yaitu kemiskinan, kecacatan, keterpencilan, keterlantaran, korban bencana, ketunaan dan korban tindak kekerasan.

### 3. Pemberdayaan

Kata pemberdayaan berasal dari bahasa inggris "*Empowerment*", secara harfiah diartikan sebagai "*Pemberkuasaan*", pemberian atau peningkatan "*Kekuasaan*" kepada masyarakat lemah (disadvantaged). Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, pemberdayaan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.<sup>4</sup> Pada intinya pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya.<sup>5</sup>

### 4. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan seorang wanita yang menjual dirinya dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan sebagai

---

<sup>4</sup>Koesnadi Hardjasoemantri, *Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan, Sebuah Pendekatan Hukum Lingkungan, dalam Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 61.

<sup>5</sup> Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSSI, 1996), h. 2-8.

pembayarannya.<sup>6</sup> Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang mengikuti kegiatan pembinaan sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung yang sekaligus menjadi subjek atau sasaran utama dalam penelitian ini.

Dengan demikian, dari penegasan judul diatas yang dimaksud dengan “Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dalam Pemberdayaan Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Teluk Betung Utara Bandar Lampung“ adalah upaya pemberdayaan dan pembinaan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dilakukan oleh LKS untuk pemberian atau peningkatan kemampuan terhadap para Eks PSK agar dapat mengaktualisasikan dirinya secara utuh tanpa bergantung dengan orang lain, sehingga para Eks PSK nantinya dapat hidup mandiri dan kembali bersosialisasi ke masyarakat sebagaimana wanita seutuhnya.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul tersebut sebagai berikut :

1. Lembaga Kesejahteraan sosial mempunyai tugas dan tujuan untuk membina eks pekerja seks komersial (PSK), yaitu pembinaan tersebut meliputi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar para eks pekerja seks komersial (PSK) dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya sebagaimana mestinya. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama,yaitu berupaya

---

<sup>6</sup> KartonoKartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2009), h.185.



meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 terklasifikasi dalam 7 (tujuh) kelompok, yaitu kemiskinan, kecacatan, keterpencilan, keterlantaran, korban bencana, ketunaan dan korban tindak kekerasan.

2. Lembaga Kesejahteraan sosial merupakan tempat pemberdayaan dan pembinaan dengan memberikan pelatihan keterampilan serta membina psik untuk berperilaku baik, dan menjadi pribadi yang lebih baik, agar ketika selesai menjalani masa pembinaan dan bergabung kembali kedalam lingkungan masyarakat, ia dapat menjadi anggota masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya.
3. Melihat prospek waktu dan tempat mudah di jangkau oleh peneliti.

### **C. Latar Belakang**

Perempuan dalam islam memiliki posisi dan martabat yang tinggi.<sup>7</sup>Walau demikian, dalam realitas kehidupan masih sering dijumpai adanya deskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap perempuan.<sup>8</sup>Padahal salah satu tujuan Allah SWT menciptakan manusia adalah untuk menyembah kepada-Nya.Kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan

---

<sup>7</sup> Raqib.Moh, *Pendidikan Perempuan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), h.3.

<sup>8</sup>*Ibid.*

perempuan.keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal.<sup>9</sup>

PSK sering diartikan sebagai wanita yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual laki-laki siapapun yang menginginkannya, dimana wanita tersebut menerima sejumlah uang atau barang. Dari pengertian ini nampaklah bahwa masalah PSK merupakan masalah sosial yang kompleks karena perbuatannya tersebut telah menyimpang dari norma-norma atau nilai-nilai masyarakat. Di samping itu, masalah PSK merupakan masalah yang menghambat lajunya pembangunan karena dapat merugikan keselamatan, ketentraman jasmani, rohani, maupun sosial. Oleh karena itu, kehadirannya ditengah-tengah masyarakat hingga kini banyak mendapat hinaan dan penolakan dari anggota masyarakat.

Dalam masyarakat, kehidupan seorang PSK merupakan suatu hal yang kurang dapat diterima. Sampai sekarang PSK dipandang sebagai makhluk yang menyandang *stereotype* negatif, dan tidak dianggap pantas menjadi bagian dari masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, PSK selalu mendapatkan tekanan dari masyarakat, bahkan menjadi olokan dan ejekan. Tekanan dan perlakuan negatif dari lingkungan ini biasanya muncul dari perilaku masyarakat yang ingin selalu memojokan mereka.<sup>10</sup>

Kemudian jika melihat kehidupan nyata bahwa banyak dari para PSK itu terpaksa menjalani pekerjaan sebagai PSK karena tekanan ekonomi. Banyak faktor

---

<sup>9</sup> Riwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), h.123-124.

<sup>10</sup> Koeswara, E, *Logoterapi, Psikoterapi Viktor Frankl*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), h. 32.

yang mendorong seseorang untuk terjun ke dalamnya. Diantaranya adalah alasan yang mungkin klasik, yaitu kemiskinan, kondisi ekonomi yang serba kekurangan memaksa melakukan pekerjaan asusila ini. Tidak sedikit yang melakukannya karena frustrasi, tidak harmonisnya rumah tangga atau keluarga, perceraian bahkan ada yang memang karena memang mencari kepuasan.

Ditengah dunia yang penuh dengan keluarbiasaan dan keberlebihan ini, maka hanya ada satu sistem sosial yang mampu membimbing setiap aspek kodrat manusia secara penuh yaitu Agama. Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Isra(17):32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”*.<sup>11</sup>

Berangkat dari hal ini pula penanganan yang bersifat kemasyarakatan dengan berbasis masyarakat mempunyai arti yang sangat penting. Tidak sedikit dari mereka akhirnya ditampung di tempat-tempat Rehabilitasi sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar dan mereka bisa meninggalkan kebiasaan buruk mereka menuju kebiasaan yang lebih terhormat seirama dengan hati nurani. Keberhasilan dari tempat rehabilitasi sosial ini didukung pulakesadaran dari setiap individu untuk memiliki rasa optimis dalam menghadapi masa depannya, karena sikap optimis adalah modal utama bagi

---

<sup>11</sup> Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2000), h. 215.

seseorang untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan meraih keberhasilan di masa yang akan datang.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Teluk Betung Utara Bandar Lampung bertugas memberikan pelayanan rehabilitas sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan dan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para Pekerja seks komersial agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan rehabilitasi tersebut diharapkan para eks psk dapat mengembangkan diri dan potensinya sehingga akan meningkatkan percaya diri, harga diri, dan tanggung jawab sosialnya dalam masyarakat serta dapat hidup mandiri secara normatif sebagaimana layaknya masyarakat lainnya. Hal ini yang juga menjadi inti dari program pemberdayaan Eks Pekerja Seks Komersial (PSK).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah :Bagaimana Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dalam Pemberdayaan Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Teluk Betung Utara Bandar Lampung ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :Untuk mengetahui Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dalam Pemberdayaan Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak :

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat pemikiran dalam bentuk dokumen yang kaitannya dengan penelitian bagi mahasiswa maupun pembaca untuk mendapatkan data-data yang lebih komprehensif.
2. Penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dalam memecahkan suatu masalah baik, bagi para peneliti maupun orang-orang atau instansi yang menerapkan hasil penelitian ini.
3. Dapat memberikan bahan pertimbangan untuk peneliti sejenis yaitu penelitian yang berkaitan dengan Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam Pemberdayaan Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) di Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid, maka dalam tulisan ini akan menguraikan metode penelitian yang dipergunakan. Menurut Babbie E, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah mempunyai karakteristik rasional, empiris dan sistematis.<sup>12</sup> Cara ilmiah yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut :

---

<sup>12</sup>Etta Mamang Sangadji, Sopiah *“Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian”* (Yogyakarta: Andi, 2010), h.4

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field reserch) yang bermaksud untuk mengetahui permasalahan yang ada di lokasi penelitian yang bersumber data utamanya berasal dari lapangan.<sup>13</sup> Penelitian field research yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam Pemberdayaan Eks Pekerja Seks Komersial(PSK) di Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan fakta. Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan factual mengenai fakta-fakta dan sifat populasi. Penelitian field research termasuk dalam penelitian ini. Penelitian ini menjelaskan tentang Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam Pemberdayaan Eks Pekerja Seks Komersial(PSK) di Teluk Betung Utara Bandar Lampung.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Menurut Lofland and Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J. Maleong, 2005:157). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu :

---

<sup>13</sup> M. Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h.22.

<sup>14</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2012), h.38.

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data ini merupakan sumber dari pihak yang pertama kali memberikan data kepada peneliti, yang diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung.<sup>15</sup>

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya dari catatan atau dokumen-dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data ini bisa digunakan sebagai pendukung atau melengkapi data primer.<sup>16</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku referensi, penelitian-penelitian sejenis dan dokumen yang berasal dari lokasi penelitian yang berupa laporan-laporan baik laporan triwulan maupun laporan tahunan.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar

---

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.84.

<sup>16</sup> *Ibid.* h.85.

jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek lain.<sup>17</sup>

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah eks pekerja seks komersial binaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial berjumlah 60, pegawai LKS Kreasi berjumlah 9. Sehingga total dari populasi berjumlah 69orang.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).<sup>18</sup>

Adapun teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non random sampling* artinya teknik yang tidak memberikan peluang (kesempatan) yang sama bagi setiap unsur-unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.<sup>19</sup> Maksudnya tidak semua anggota eks Pekerja Seks Komersial melainkan cukup orang tertentu yang dianggap mampu untuk mewakilinya.

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.80

<sup>18</sup> *Ibid.* h.81

<sup>19</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.156



Teknik non random sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>20</sup> Untuk mempermudah peneliti dalam pengambilan sampel, peneliti akan memisahkan atau mengelompokkan populasi yang berhak menjadi sampel Kriteria sebagai berikut :

- 1) Pekerja seks komersial yang sudah melalui tahap pembinaan selama satu tahun.
- 2) Wanita yang menjadi pekerja seks komersial dikarenakan faktor rendahnya ekonomi.
- 3) Wanita yang menjadi pekerja seks komersial dikarenakan pengaruh lingkungan dan gaya hidup yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ditetapkan populasi yang akan dijadikan sampel sebagai berikut :

- 1) Ketua LKS Kreasi, secara terbuka dan sukarela memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan data penelitian.
- 2) Pegawai LKS Kreasi yang membantu dalam proses pemberdayaan dan pembinaan eks PSK.
- 3) Eks PSK yang membantu dalam memberikan informasi secara terbuka dan sukarela seputaran proses pemberdayaan dan pembinaan yang diberikan LKS Kreasi.

Berdasarkan identifikasi tersebut, yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Ketua dan pegawai yang bekerja di LKS Kreasi berjumlah 3 orang, dan eks

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.157

PSK yang sedang dibina di LKS Kreasi berjumlah 7 orang. Adapun jumlah sampel yang penulis tentukan berjumlah keseluruhan 10 orang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dimana masing-masing teknik mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri, sehingga penggunaan beberapa teknik pengumpulan data secara bersama-sama diharapkan akan dapat saling melengkapi satu sama lain. Adapun teknik pengumpulan data yang dimaksud sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek dalam penelitian ini. Alasan pemilihan terhadap teknik ini karena penelitian ini lebih mengandalkan kekuatan kedalaman informasi yang di dapat dan menghindarkan dari bias informasi. Wawancara dapat dilakukan secara formal maupun informal sehingga data yang diperoleh cukup lengkap dan mendalam. Apabila dilihat dari sifat atau bentuk pelaksanaan wawancara dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Interview terstruktur adalah wawancara dimana daftar pertanyaan dan katagori jawaban telah disiapkan dari wawancara.
- 2) Interview semi terstruktur adalah wawancara dimana peneliti diberi kebebasan sebeb-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur, dan setting wawancara, biasanya dengan pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan

---

<sup>21</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Semarang: PT Bumi Aksara, 1991),h.80

alurpembicaraan.

- 3) Interview tidak terstruktur adalah wawancara yang hampir mirip dengan bentuk interview semi instruktur, hanya saja interview tidak terstruktur memiliki kelonggaran dalam banyak hal termasuk dalam pedoman interview.

Dalam hal ini penulis menggunakan interview semi instruktur yaitu penginterview membaca kerangka pertanyaan untuk disajikan dan irama interview sama sekali diserahkan kepada penginterview. Teknik ini memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara bebas dan mendalam.

Dalam melakukan wawancara, perlu diingat bahwa pewawancara ingin mengetahui sikap dan pendapat responden. Ini berarti bahwa pewawancara harus bersikap netral dan tidak mengarahkan jawaban atau tanggapan responden. Pewawancara harus bertingkah laku (bersikap) sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

#### b. Observasi

Untuk memperoleh data dilapangan maka peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Peneliti mengumpulkan keterangan dengan melihat, mengamati, kalau perlu merekam dan mencatat perilaku dan ucapan-ucapan dari informan yang relevan. Ada dua jenis observasi yang biasa digunakan oleh para penulis, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Observasi partisipan adalah suatu proses dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diteliti, dengan observasi ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h.70

sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

- 2) Observasi non partisipan adalah suatu proses dimana peneliti tidak ikut dalam kehidupan orang yang diteliti, peneliti hanya sebagai pengamat independen.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipan yakni peneliti ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah peneliti merupakan bagian dari mereka dan peneliti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sumber data.

Manfaat dalam observasi partisipan adalah peneliti mampu memahami keseluruhan data dan kondisi sosial, dengan begitu peneliti akan memperoleh data menyeluruh, dengan observasi ini peneliti tidak hanya mendapatkan data, melainkan pengalaman secara langsung. Metode partisipan dapat memberikan gambaran yang lebih realistis tentang suatu peristiwa dan tingkah laku, dapat menemukan hal-hal yang tidak terungkap dalam wawancara. Selain itu peneliti dapat memperoleh kesan pribadi dan merasakan jiwa sosial saat peneliti dilakukan.

#### c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data melalui buku-buku, arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian dan sebagai data pendukung analisis yang diperoleh di lokasi penelitian yang berupa dokumen dan laporan dari bagian tata usaha dan bagian pelayanan rehabilitasi.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif dengan menggunakan model analisis data interaktif. Teknik tersebut meliputi 3 hal yaitu:

### **a. Reduksi Data**

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data kasar yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses penelitian dan mengatur data sedemikian sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.

### **b. Sajian Data**

Merupakan rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat penyajian data, maka peneliti akan dapat mengerti apa yang terjadi serta memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa oleh tindakan lain yang berdasarkan pengertian tersebut.

### **c. Penarikan Kesimpulan**

Dari sajian data yang telah tersusun, maka selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data menggunakan proses siklus.

## BAB II

### LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN EKS PEKERJA SEKS KOMERSIAL

#### A. Kesejahteraan Sosial

##### 1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya.<sup>23</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>24</sup>

Namun, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan

---

<sup>23</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, ed. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 572.

<sup>24</sup>Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia bab I Pasal 1.

baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.<sup>25</sup>

Kesejahteraan sosial di negara-negara maju, disebut dengan jaminan sosial (*social security*), seperti bantuan sosial (*social assistance*) dan jaminan sosial (*social insurance*), yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.<sup>26</sup> Kesejahteraan sosial merupakan disiplin ilmu yang didasarkan pada keterpaduan antara kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keterampilan (*body of skill*), dan kerangka nilai (*body of value*) yang bertujuan membantu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial mengembangkan segala potensi dan sumber yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat-masyarakat.

---

<sup>25</sup>Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 34.

<sup>26</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 3.

Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya. Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang relative baru berkembang. Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik dan banyak orang yang menamainya sebagai kegiatan amal. Di amerika serikat kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai bantuan public yang dilakukan oleh pemerintah bagi keluarga miskin. Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat.

Kesejahteraan sosial menurut Rukminto adalah Suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah social, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.<sup>27</sup> Pengertian di atas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan bisa mencapai kearah kehidupan yang lebih baik lagi.

---

<sup>27</sup>Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Interaksi Komunitas*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE.UI, 2005). h.17



Merujuk kepada undang-undang No.11 tahun 2009 yang dikutip oleh mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah "Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya".<sup>28</sup> Adanya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu materil, spiritual, dan sosial sehingga akan mendorong masyarakat menuju ke arah kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya. Dalam hal ini peran dari tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakatnya harus ditingkatkan. Ilmu kesejahteraan sosial merupakan kelanjutan dan sebuah penyempurnaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian Kesejahteraan Sosial seperti yang diuraikan di atas bahwa Kesejahteraan sosial suatu fungsi terorganisasi yang dipandang sebagai suatu kumpulan kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat agar dapat mengatasi masalah-masalah sosial yang berubah-ubah. Kesejahteraan sosial juga memiliki fungsi lain yang lebih luas, yaitu berkaitan dengan pembangunan sosial.

Didalam pengertian yang lebih luas tersebut, kesejahteraan sosial berperan dalam hal ikut memberikan sumbangan pada peningkatan keefektifan mobilisasi dan konsolidasi sumber-sumber materil dan manusiawi agar dapat memenuhi persyaratan- persyaratan sosial dari perubahan. Kesejahteraan sosial

---

<sup>28</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 713.

merupakan suatu bentuk kelembagaan sosial yang dikembangkan oleh masyarakat untuk menyediakan sumber-sumber dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia.

## **2. Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Seperti yang telah di jelaskan diatas tentang pengertian kesejahteraan sosial juga kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.<sup>29</sup>

Dari pengertian di atas dapat diuraikan untuk untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat harus terpenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan agar mendukung terhadap aktivitas-aktivitas sosial masyarakat untuk mengembangkan potensi hidup dengan menggali sumber-sumber yang berguna untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

---

<sup>29</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 10.

### 3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial untuk memperbaiki secara progressif dari kondisi kehidupan seseorang melalui pengembangan sumber daya manusia dengan penggunaan, penciptaan sumber komunitas, penyediaan struktur institusional untuk berfungsinya pelayanan yang terorganisasi dan pembangunan yang berorientasi terhadap perubahan sosial. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlender dan Apte yaitu sebagai berikut ini:

#### 1) Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakn pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

#### 2) Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosi, dan sosial agar yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

#### 3) Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

#### 4) Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang kesejahteraan sosial yang lain.<sup>30</sup>

Dari pengertian di atas bahwa fungsi kesejahteraan sosial untuk membantu proses pertolongan baik individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat berfungsi kembali dengan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, serta terhindar dari masalah-masalah sosial baru dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial untuk pencegahan masalah sosial yaitu mendorong individu, keluarga, dan masyarakat untuk berupaya agar mereka tidak masuk kedalam masalah sosial yang berdampak kepada kehidupan contohnya kemiskinan, kekerasan, traumatik, penyimpangan sosial, fungsi kesejahteraan sosial untuk fungsi penyembuhan jika individu, keluarga ataupun masyarakat dalam kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosi, dan sosial untuk menyelesaikan masalah dikehidupannya kesejahteraan sosial hadir dengan memfungsikan sosial, metode-metode, teknik-teknik yang diberikan guna memberikan perubahan dan pemulihan pada individu, keluarga, dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial juga berfungsi untuk pengembangan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Prinsip dasar pengembangan masyarakat yaitu pembangunan yang terintegrasi, menghilangkan ketimpangan dan ketidak

---

<sup>30</sup>*Ibid.* h.10.

berutungan struktural, penegakan HAM, pemberdayaan masyarakat serta memperkuat perpaduan proses dan hasil pembangunan berdasarkan konsensus, kerjasama dan partisipasi. Fungsi yang selanjutnya yaitu penunjang tentunya suatu sistem tidak dapat berjalan tanpa satu unsur yang berjalan untuk menjalankan sistem semua unsur harus berjalan serta bekerja sama, sebagai contoh kesejahteraan sosial sebagai penunjang medis, hak asasi manusia, politik, hukum, ekonomi, dan agama.

Dari fungsi-fungsi kesejahteraan sosial yang sudah dijelaskan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan terorganisir untuk mengfungsikan sosial kembali individu, kelompok, masyarakat.

#### **4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)**

Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang disebut LKS adalah Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Seperti, 1) Meningkatkan keterampilan manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial guna peningkatan kinerja organisasi, 2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi penerima manfaat dengan menggunakan metode Pekerjaan Sosial, 3) Menggali potensi yang dimiliki oleh Lembaga Kesejahteraan Sosialnya masing-masing dalam meningkatkan kemandirian untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, 4) Menggali dan menghubungkan sumber-sumber yang tersedia

di sekitar Lembaga Kesejahteraan Sosial, 5) Memperkuat jaringan kerjasama komunikasi antara Lembaga Kesejahteraan sosial dengan PSKS lain dan Dunia Usaha sehingga dapat mengembangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, 6) Meningkatkan kemandirian LKS/Orsos masing-masing dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.<sup>31</sup>

UU No.11 tahun 2009 mendefinisikan tentang Kesejahteraan Sosial adalah “Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya”.<sup>32</sup> Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama, yaitu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Maknanya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, namun target utamanya adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 terklasifikasi dalam 7 (tujuh) kelompok, yaitu kemiskinan, kecacatan, keterpencilan, keterlantaran, korban bencana, ketunaan dan korban tindak kekerasan.

---

<sup>31</sup>[http://psks.dinsos.jatengprov.go.id/oz/index.php?option=com\\_sppagebuilder&view=page&id=82](http://psks.dinsos.jatengprov.go.id/oz/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=82)

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 713.

a. Program Pembinaan Eks Pekerja Seks Komersial yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan atau sasaran. Begitupun organisasi milik pemerintah, yang salah satunya kedinasan yang juga memiliki tujuan atau sasaran yang harus dicapai, namun tujuan tersebut masih bersifat abstrak. Jadi untuk dapat mencapainya tersebut harus diubah ke bentuk yang lebih operasional. Tujuan yang telah diubah bentuknya menjadi lebih operasional disebut dengan program.

Menurut Kamus Modern Bahasa Indonesia (1994: 538) program adalah ketentuan rencana dari pemerintah; acara; rencana; rancangan (kegiatan). Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yaitu pembinaan itu sendiri bisa berarti tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua, pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu (Miftah Thoha, 1993: 7).

Sehubungan dengan masalah keberadaan pekerja seks komersial, maka pembinaan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Kreasi terhadap eks PSK untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian bantuan, motivasi, bimbingan-bimbingan melalui rehabilitasi sosial agar mereka kembali ke masyarakat secara wajar dan tidak lagi menjadi sampah masyarakat.

Dari pengertian pembinaan diatas maka dapat diketahui bahwa pembinaan sangat diperlukan dalam mengatasi masalah eks pekerja seks komersial. Eks Pekerja seks komersial pada dasarnya adalah wanita yang mempunyai hak untuk mengenyam kehidupan yang layak seperti wanita-wanita lainnya. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Ada kecenderungan bahwa usia para eks psk itu adalah usia produktif, usia dimana potensi dan kemampuan mereka dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya, keluarganya, negara dan bangsanya. Mereka adalah aset untuk pembangunan.

Para eks psk dapat menjadi aset pembangunan dan memberikan kontribusinya bagi pembangunan dengan syarat mereka hidup layaknya penduduk lain yang mengetahui nilai dan norma-norma susila yang berlaku dan membuat mereka dapat berkarya sesuai dengan harkat dan martabat wanita dan menjadi anggota masyarakat secara normatif maka diperlukan usaha pembinaan melalui rehabilitasi yaitu pemungisian serta pemulihan kembali kemampuan fisik, sosial serta mental dari wanita tersebut. Dengan ini diharapkan agar mereka benar-benar dapat berkarya dari segi fisik, mental, dan sosial serta mempunyai bekal keterampilan, sehingga nantinya mereka tidak lagi menjadi sampah masyarakat dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Untuk mewujudkan harapan tersebut dalam rangka mencapai efisiensi dan hasil guna yang optimal, program-program pembinaan/rehabilitasi harus dipilih, dipilah, dan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan aktual yang dapat



diterima dan diperlukan di masyarakat tempat dimana kelayan akan dikembalikan sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya secara normal dan wajar selaras dengan norma dan etika yang berlaku.

Program pembinaan eks wanita tuna susila ini dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Adapun pengertian rehabilitasi sosial adalah:

“Usaha penanggulangan pelacuran dengan mengembalikan keadaan dan kedudukan orang-orang yang terlibat dalam pelacuran agar mereka menjadi manusia yang berpribadi, berfungsi sesuai dengan situasi dan keadaan yang sehat, bermental kuat, bersikap dan bertindak laku sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat.”<sup>33</sup>

Tujuan dari rehabilitasi sosial ini adalah terbinanya para penyandang masalah tuna susila menjadi berkemampuan dan berkemauan untuk mengembalikan harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial dalam melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Dinsos Prop Jateng, 1993/1994).

Proses pembinaan melalui rehabilitasi sosial terhadap eks pekerja seks komersial ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap Pendekatan Awal meliputi: Orientasi dan konsultasi, Identifikasi, Motivasi, Seleksi.
- 2) Tahap Penerimaan meliputi: Registrasi, Pengungkapan dan penelaahan masalah, Penempatan dan pelayanan rehabilitasi.
- 3) Tahap Bimbingan, meliputi:

---

<sup>33</sup> Monografi, *Lembaga Kesejahteraan Sosial Kreasi*, Tanggal Dicatat 22 Agustus 2019.

a) Bimbingan Fisik

Bimbingan ini ditujukan untuk meningkatkan ketahanan fisik dan kondisi kesehatan para kelayan. Untuk itu para kelayan diberi bimbingan hidup sehat, antara lain melalui: olahraga/SKJ, pelayanan kesehatan dan pemberian makanan bergizi.

b) Bimbingan Mental/Psikologis

Bimbingan ini ditujukan untuk membimbing dan memperbaiki kondisi mental para kelayan, meningkatkan semangat juang agar mereka tidak lekas menyerah oleh keadaan serta mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri menuju pada keadaan yang lebih baik. Untuk itu para kelayan diberi bimbingan atau pelajaran agama, etika, sopan santun dan budi pekerti.

c) Bimbingan Sosial/Kemasyarakatan

Bimbingan ini ditujukan agar para kelayan dapat hidup bermasyarakat dengan baik, untuk itu mereka diberi bimbingan berupa P4, KB, PKK, Kamtibmas, dan kewirausahaan.

d) Bimbingan Keterampilan

Bimbingan ini dimaksudkan agar para kelayan nantinya dapat hidup mandiri dalam masyarakat. Untuk itu mereka diberi pendidikan keterampilan antara lain: menjahit, tata rias, memasak, tata laksana rumah tangga, membordir dan lain-lain.

## B. Pemberdayaan

### 1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah pengembangan diri dari keadaan berdaya atau kurang berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan suatu perubahan.<sup>34</sup>

Pemberdayaan bisa diartikan sebagai perubahan kepada arah yang lebih baik, dari tidak berdaya menjadi berdaya. Pemberdayaan terkait dengan upaya kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, tentunya dalam menentukan tindakan kearah yang lebih baik lagi.<sup>35</sup>

Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Menurut Imang Mansur Burhan sebagaimana dikutip oleh Nani Machendrawati dan Agus Achmad Syafei didefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya untuk membangkitkan potensi umat islam kearah yang lebih baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi.<sup>36</sup>

Amrullah Ahmad mengatakan bahwa “ Pengembangan masyarakat islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan

---

<sup>34</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2000), Cet. Ke-1, h.32-33.

<sup>35</sup>Diana, *Perencanaan Sosial Negara Berkembang* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), h.15.

<sup>36</sup>Nani Machendrawati dan Agus Achmad Syafei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2001), Cet-Ke1, h. 42.

masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif islam.<sup>37</sup> Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.<sup>38</sup>

Adapun pemberdayaan menurut Mc. Ardle, adalah proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber daya lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian Mc. Ardle mengimplikasikan makna tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.<sup>39</sup>

Payne, mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*) Pada intinya ditujukan guna membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk

---

<sup>37</sup>M Amrullah Ahmad, *Strategi Dakwah di Tengah Era Reformasi Menuju Indonesia Baru dalam Memasuki Abad 21*, (Bandung: 1999), h. 9.

<sup>38</sup>Gunawan Sumodiningrat, *Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997) Cet Ke-1, edisi II, h. 165.

<sup>39</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, (Fakultas Ekonomi UI, 2002), h. 162.

menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya.<sup>40</sup>

Shardlow melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dalam upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.<sup>41</sup>

Pemberdayaan dalam sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kepuasan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjukan kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti yang memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi

---

<sup>40</sup> Priyono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSSI, 1996), h. 2-8.

<sup>41</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Op.Cit.* h. 164.

dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>42</sup>

Dari pengertian diatas maka disimpulkan bahwa yang dimaksud pemberdayaan adalah sebuah gerakan penguatan sosial agar masyarakat yang sebelumnya lemah, baik dalam bidang sosial, ekonomi, serta politik diberdayakan sehingga mebangkitkan kesadaran masyarakat tersebut dalam meningkatkan potensi yang mereka miliki dan guna membangun serta menentukan berdasarkan keinginan mereka secara mandiri, strategi dan pendekatan tertentu yang dapat menjamin keberhasilan hakiki dalam bentuk kemandiriannya

## **2. Tujuan Pemberdayaan**

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membantu pengembangan darimasyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal dan kelompok wanita yang didiskriminasi atau dikesampingkan. Menurut Sulistiyaning mengatakan tujuan pemberdayaan adalah individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.<sup>43</sup>

Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

---

<sup>42</sup>Edi Suharto, *Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim Konsep, Indikator Dan Startegi*, (Artikel di akses pada 24 agustus 2014) dari [http://www.policy.hu/suharto/modu\\_a/makindo\\_30.htm](http://www.policy.hu/suharto/modu_a/makindo_30.htm)

<sup>43</sup>Febri Setiawan, *Op.Cit*, h. 34

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa “pemberdayaan” merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (people centered development). Terkait dengan hal ini, pembangunan, apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial-budayanya. Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Perbaikan pendidikan (better education) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak

terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

b. Perbaikan aksesibilitas (better accessibility)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

c. Perbaikan tindakan (better action)

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

d. Perbaikan kelembagaan (better institution)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

e. Perbaikan usaha (better business)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

f. Perbaikan pendapatan (better income)



Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

g. Perbaikan lingkungan (better environment)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

h. Perbaikan kehidupan (better living)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

i. Perbaikan masyarakat (better community)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.<sup>44</sup>

Tujuan pemberdayaan yang telah disampaikan diatas, seperti membantu mengembangkan kelompok wanita yang didiskriminasi atau dikesampingkan, karena tujuan pemberdayaan dalam tulisan ini adalah membantu Wanita yang hilang kemerdekaan untuk bisa mandiri dengan skill yang telah didapatkannya melalui pembinaan. Kemudian tujuan pemberdayaan seperti melakukan perbaikan pada mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun

---

<sup>44</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif kebijakan publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 109-112.

sosial-budaya-nya, karna selain secara fisik yaitu skill yang didapatkan, perlu perbaikan mental untuk menumbuhkan jiwa semangat dalam hidupnya, kemudian perbaikan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta perbaikan sosialbudaya-nya untuk menjalin hubungan sosial yang baik dengan lingkungannya dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

### **3. Kelompok Lemah dan Ketidakberdayaan**

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai konsep kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa sasaran kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a) Kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan keluarga.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: RafikaAditama, 2014), h. 58-59.

Berdasarkan pernyataan Edi Suharto dalam bukunya Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, menunjukkan bahwa kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi merupakan suatu golongan yang perlu diberdayakan secara khusus.

#### **4. Peran Penyuluh/Fasilitator dalam Pemberdayaan**

Mardikanto (2003) menyampaikan beragam peran penyuluh/fasilitator pemberdayaan masyarakat:

- a) Peran edukasi,; yaitu berperan sebagai pendidik dalam arti untuk mengembangkan proses belajar-bersama penerima manfaatnya, dan terus menanamkan pentingnya belajar sepanjang hayat kepada masyarakat penerima manfaatnya;
- b) Peran inovasi,; yaitu peran penyebarluasan informasi/inovasi dari “luar” kepada masyarakat penerima manfaatnya, atau sebaliknya; dan dari sesama warga masyarakat kepada warga masyarakat yang lain (di dalam maupun antar sistem sosial yang lain);
- c) Peran fasilitasi,; yaitu memberikan kemudahan dan menunjukkan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh penerima manfaat dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain;
- d) Peran konsultasi,; yaitu sebagai penasihat atau pemberi alternative pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaatnya dan pemangku kepentingan yang lainnya;

- e) Peran pemantauan (monitoring) dan evaluasi, yaitu peran untuk melakukan pengamatan, pengukuran, dan penilaian atas proses dan hasil-hasil pemberdayaan masyarakat, baik selama kegiatan masih sedang dilaksanakan (on-going), maupun pada saat sebelum (formatif) dan setelah kegiatan dilakukan (ex-post/sumatif).<sup>46</sup>

Dari beberapa peran yang disebutkan oleh Totok, penulis menganggap bahwa semua peran tersebut adalah sangat penting dan harus dimiliki oleh semua fasilitator, baik fasilitator dari Lembaga Pemasyarakatan maupun yang bukan, karena semua peran tersebut adalah benar, yang harus dimiliki agar masyarakat/warga binaan pemasyarakatan bisa mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan.

### **C. Pekerja Seks Komersial (PSK)**

#### **1. Pengertian Prostitusi**

Secara etimonologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “prostituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihail menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-

---

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 143.

perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>47</sup>

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>48</sup> Para wanita yang melakukan prostitusi sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.<sup>49</sup>

Menurut Koentjoro yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.<sup>50</sup>

Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut: (1) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk

---

<sup>47</sup>Drs. H. Kondar Siregar, MA, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, (Perdana MitraHandalan, 2015), h. 1-3.

<sup>48</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 159-160.

<sup>49</sup>Simanjuntak.B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1982),h. 25.

<sup>50</sup>Koentjoro, *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*. (Yogyakarta: Tinta, 2004), h. 36.

pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. (2) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu nafsu seks dengan imbalan pembayaran. (3) Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegaskan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.<sup>52</sup>

## **2. Faktor-Faktor Terjadinya Prostitusi**

Beberapa faktor terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Ada pun pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya, *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah :<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005), h. 214.

<sup>52</sup> Ibid, h.215.

<sup>53</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013),h. 355-356.

- a) Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.
- b) Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.
- c) Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri. Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu :<sup>54</sup>

1) Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

---

<sup>54</sup> Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta: PINUS Book Publisher, 2007), h. 80-83.

## 2) Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

## 3) Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

## 4) Niat lahir batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh



lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak di dominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya ada mahasiswa yang berprofesi pelacur.

#### 5) Faktor persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak criminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

#### 6) Faktor sakit hati

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

### 7) Tuntutan keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadangkadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

## 3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi

### a) Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari

kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

b) Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks Komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

c) Pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Caswanto, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016, h. 36-38.

#### 4. Pekerja Seks Komersial

Pekerja seks komersial atau Wts merupakan seorang wanita yang menjual dirinya dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan sebagai pembayarannya.<sup>56</sup> Menurut Kartini Kartono, PSK atau pelacur adalah “Wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan mala/celaka dan penyakit baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya maupun kepada dirinya sendiri”. Dalam bahasa Inggris pekerja seks komersial disebut *prostitute*, sedang penamaan kasarnya adalah *sundal*, *balon*, *lonte*.<sup>57</sup> Ada pula yang menyebut Psk dengan pelacur. Pada tahun-tahun 60-an oleh beberapa pihak terutama petugas dari Dinas sosial digunakan istilah *eufemisme* untuk memperhalus artinya, yaitu wanita tuna susila dan belakangan ini ada istilah baru untuk menyebutnya yaitu pekerja seks komersial.

Peraturan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono menyebutkan bahwa Psk adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin diluar perkawinan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak.<sup>58</sup> Sementara menurut Soedjono PSK atau wanita pelacur adalah: “Wanita yang menjual dirinya kepada laki-laki dengan menerima bayaran atas *service* yang

---

<sup>56</sup> Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2009), h.185.

<sup>57</sup> *Ibid.* h. 199-208.

<sup>58</sup> Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2009), h. 205-206.

diberikannya, atau wanita yang mata pencaharian (nafkahnya) menyediakan diri bagi siapa saja yang menghendaknya (tanpa pilihan), dan atas kesediannya dia mendapat upah, uang, atau barang-barang yang diterimanya sebagai pembayaran”.<sup>59</sup>

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Orang Menjadi Pekerja Seks Komersial**

Ada berbagai alasan yang menyebabkan seorang wanita untuk menjadi PSK. Menurut Simandjuntak (1981: 30-41) ada empat faktor yang menyebabkan seorang wanita melacurkan diri, yaitu:

- 1) Faktor psikologis, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan kejiwaan, seperti psykopat, psykoneurosa danpsykhosa.
- 2) Faktorekonomis, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan sifat dasar manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (sandang,pangan,papan)
- 3) Faktor sosial, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan proses interaksi sosial dalam bentuk imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati dalamlingkungan.<sup>60</sup>

Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang mengikuti kegiatan pembinaan sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung yang

---

<sup>59</sup> dirjosisworo Soedjono, *Pathologi Sosial*, (Bandung: Karya Nusantara, 1982), h. 112.

<sup>60</sup> Simanjuntak, B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1981) h. 30.

sekaligus menjadi subjek atau sasaran utama dalam penelitian ini. Upaya pemberdayaan dan pembinaan Eks Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dilakukan oleh LKS untuk pemberian atau peningkatan kemampuan terhadap para PSK agar dapat mengaktualisasikan dirinya secara utuh tanpa bergantung dengan orang lain, sehingga para PSK nantinya dapat hidup mandiri dan kembali bersosialisasi ke masyarakat sebagaimana wanita seutuhnya.

# LAMPIRAN

## **PANDUAN INTERVIEW**

### **A. Pekerja Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Kreasi**

1. Bagaimana sejarah Lembaga Kesejahteraan Sosial Kreasi ?
2. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kreasi ?
3. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kreasi ?
4. Apa saja bentuk program pemberdayaan Eks Pekerja Seks Komersial di LKS Kreasi?
5. Bagaimana proses dan tahapan pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kreasi ?
6. Siapa saja pihak-pihak yang bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kreasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan?
7. Kapan program pemberdayaan di LKS Kreasi dilaksanakan?
8. Berapa banyak Eks PSK yang dibina di LKS Kreasi ?
9. Fasilitas apa saja yang diberikan ?
10. Sarana dan Prasarana yang ada di LKS Kreasi ?



**B. Eks Pekerja Seks Komersial di LKS Kreasi**

1. Latar belakang mengapa bisa terjerumus kedalam dunia prostitusi ?
2. Apa saja proses pembinaan yang di lakukan LKS Kreasi ?
3. Bagaimana tahapan dan proses pemberdayaan yang dilakukan ?
4. Apa saja kegiatan yang dilakukan di LKS Kreasi selama mengikuti program pemberdayaan ?
5. Perubahan apa saja yang dirasakan selama masa pembinaan di LKS Kreasi ?

## **DAFTAR NAMA SAMPEL**

1. Ketua LKS Kreasi : Sudarsih, S.Pd.I.
2. Bendahara : Firman Adi S, A.Md.
3. Pekerja Sosial : Istianah, A.Md.
4. Pekerja Sosial : Eka Purwa
5. Eks PSK : Mujiati
6. Eks PSK : Titin
7. Eks PSK : Salbiah
8. Eks PSK : Kustinah
9. Eks PSK : Suyati
10. Eks PSK : Yohana
11. Eks PSK : Herlina

## **PANDUAN OBSERVASI**

Tempat :

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Kreasi
2. Tempat tinggal Eks PSK di Teluk Betung Utara

Kegiatan :

1. Proses Pembinaan Eks PSK di LKS Kreasi
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di LKS Kreasi

Orang :

1. Pekerja Sosial LKS Kreasi
2. Eks Pekerja Seks Komersial

## **PANDUAN DOKUMENTASI**

Melalui arsip tertulis :

1. Sejarah LKS Kreasi
2. Profil LKS Kreasi
3. Struktur LKS Kreasi
4. Daftar Warga Binaan di LKS Kreasi

Melalui Foto :

1. LKS Kreasi
2. Tempat tinggal Eks PSK di Teluk Betung Utara

## Photo Kegiatan Penelitian



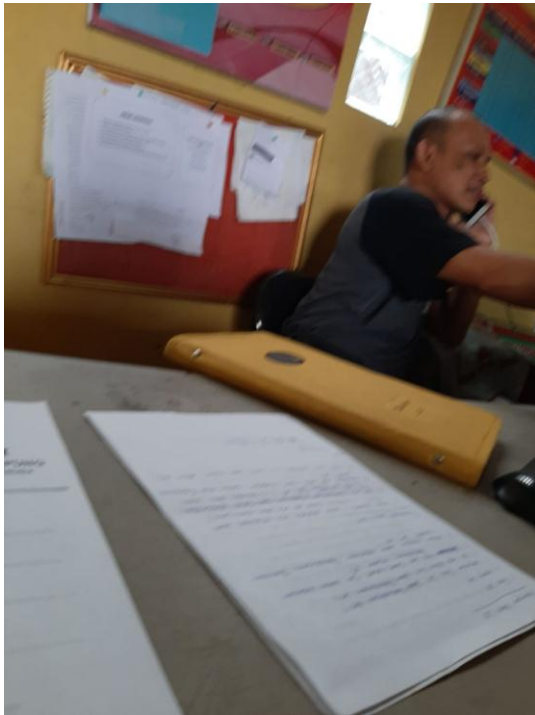
Struktur Organisasi LKS Kreasi



Wawancara dengan Ketua LKS Kreasi



Wawancara Pekerja Sosial LKS Kreasi



Wawancara dengan Bendahara LKS Kreasi



Kegiatan Usaha Eks PSK



Wawancara dengan Eks PSK



Wawancara dengan Eks PSK





Wawancara dengan Eks PSK



Wawancara dengan Eks PSK



Wawancara dengan Eks PSK



Wawancara dengan Eks PSK





Wawancara dengan Eks PSK



Wawancara dengan Eks PSK



Peneliti di LKS Kreasi



Wawancara dengan Eks PSK